

Dalam pembahasan RUU Pilkada, DPR dan pemerintah mengajukan alternatif Pemilu Serentak 2019. Itu artinya pemilu serentak akan dilaksanakan dalam waktu (kurang lebih bersamaan) dengan pemilu legislatif dan pemilu presiden. Dalam hal ini ada dua kemungkinan: *pertama*, pilkada dibarengkan waktu pelaksanaannya dengan pemilu legislatif dan pemilu presiden; *kedua*, pilkada serentak dilakukan setelah pemilu legislatif dan pemilu presiden, pada tahun yang sama. Jika pilihan pertama dilakukan, maka pemilih akan menghadapi problem besar dalam memberikan suara karena begitu banyak calon anggota legislatif dan calon pejabat eksekutif yang harus dipilih.

Dalam pemilihan seperti ini, pengaruh pemilihan pejabat nasional bisa merusak pemilihan pejabat daerah, sehingga pemilih tidak bisa memilih secara tepat pejabat daerah yang dibutuhkannya. Pemilu total nasional ini juga akan menyulitkan KPU dan jajarannya karena begitu besar dan berat beban manajemen yang harus ditanggung. Bagi partai politik, pemilu total nasional juga menghadapi problem tersendiri karena mereka super sibuk untuk harus menyiapkan sekian ratus ribu calon, sehingga proses seleksi calon tidak maksimal. Sementara itu, jika pilihan kedua yang dilakukan (pemilu legislatif, pemilu presiden, lalu pilkada serentak), maka sudah pasti pemilih akan mengalami kejenuhan, sehingga angka partisipasi pemilih pada pilkada turun drastis. Dalam model penyelenggaraan seperti ini

pemilu presiden bisa mempengaruhi pilkada serentak, tetapi akan menghasilkan kebingungan pemilih, karena pasangan calon kepala daerah tidak diajukan oleh partai-partai yang mengajukan pasangan calon presiden. Di sisi lain, partai tidak didorong untuk meningkatkan kinerjanya sepanjang tahun, karena mereka baru menemui pemilih setiap lima tahun sekali menjelang pemilu. Pola kerja partai politik yang demikian tidak akan pernah mendewasakan partai sebagai kekuatan demokrasi.

Internet memungkinkan masyarakat bertukar ide, gagasan, pikiran, juga informasi sosial melalui *gadget* peserta pemilu atau konstituen bisa mengeluarkan apa yang mereka sangka, atau gagasan sekali "klik" melalui *gadget*nya. *Gadget* identik dengan kaum muda. Kecanggihan teknologi, semakin mempercepat akses informasi di gengaman tangan dengan hanya sekali "klik", kapanpun, di manapun. Karakteristik media sosial yang spontan dan terbuka membuat kelompok masyarakat yang aktif bersuara di ruang digital lebih kritis menilai pemerintah. Kecepatan dan kedalaman berita harusnya saling berdampingan agar menghasilkan fakta akurat. Namun, dalam fenomena di media sosial, banyak *netizen* utamanya kaum muda mudah terprovokasi berita yang belum jelas faktanya. Ketika politik dan media sosial disatukan justru banyak menuai politik kebencian. Beradu argumen, lebih arif jika menyalurkannya lewat forum